

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Asia Tenggara telah memainkan peranan penting dalam ekonomi dan politik internasional selama beberapa dekade terakhir. Hal tersebut dibuktikan dari meningkatnya perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dari negara-negara di kawasan itu mulai dari pesatnya kemajuan Singapura sebagai pusat keuangan terdepan keempat didunia hingga pesatnya perkembangan masyarakat kelas menengah di Vietnam. Asia Tenggara merupakan rumah bagi lebih dari 650 juta orang atau 9% dari populasi dunia, yang juga merupakan salah satu ciri khas dari prospek pertumbuhan kawasan.

Pada tahun 2012, 190 juta (kurang dari 30%) dari penduduk kawasan ini tergolong ke dalam kelas menengah dan diproyeksikan akan tumbuh menjadi 350 juta penduduk pada tahun 2022 yang didorong oleh perkembangan dari berbagai macam sektor riil dan sektor moneter. Selama beberapa dekade terakhir, jutaan orang telah pindah dari pedesaan ke kota untuk tinggal dan bekerja. Urbanisasi yang cepat ini diperkirakan akan berlanjut dan, dalam banyak kasus, dipercepat dengan perkiraan tingkat populasi perkotaan mencapai 66% pada tahun 2050, naik dari 47% dari tahun 2015 (Kuusinen, Pierzynowski, & Yuzon, 2019). Hal tersebut tentunya membuat sebagian besar negara di Asia Tenggara harus mampu melakukan akselerasi pembangunan infrastruktur domestik di berbagai bidang, seperti transportasi, energi dan konstruksi.

Meningkatnya permintaan pembangunan infrastruktur di Asia Tenggara secara efektif dimanfaatkan oleh Tiongkok melalui prakarsa *grand strategy Belt and Road Initiative* (BRI) yang sebelumnya bernama New Silk Road dengan membangun jalur sutra maritim dan jalur sutra ekonomi darat. Program yang awalnya dipromosikan oleh presiden Xi Jinping ini berfokus pada kerja sama, saling menguntungkan, perdamaian, dan pengembangan melalui serangkaian kerjasama, pendekatan diplomatik hingga kemitraan strategis antara Tiongkok dengan lebih dari 100 negara. (Hu, Jun, & Hu, 2018) Di Asia Tenggara, sebagian besar negara yang berada di kawasan ini sudah bergabung menjadi anggota Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), sebuah bank pembangunan multilateral yang diinisiasi oleh Tiongkok. (AIIB, 2021) AIIB dijadikan Tiongkok sebagai lembaga keuangan yang menjamin dan memfasilitasi berbagai proyek pendanaan dan pembangunan dari *Belt and Road Initiative*.

AIIB kemudian dijadikan sebagai instrument penting bagi pendanaan dan pembangunan infrastruktur di Asia Tenggara. Indonesia tercatat telah melakukan pengajuan pendanaan terhadap empat proyek besar, seperti proyek pembangunan bendungan, pengentasan kemiskinan nasional, Kereta Cepat Indonesia-China, dan pariwisata di Mandalika. (AIIB, 2019) Filipina memanfaatkan AIIB untuk mendapatkan pendanaan sebesar US\$ 167 miliar melalui berbagai macam investasi infrastruktur dalam negeri (AIIB, 2019). Thailand juga melakukan kerjasama kereta cepat Bangkok-Nakhon Ratchasima dengan Tiongkok, proyek ini memiliki nilai hingga US\$ 101,3 juta dan ditujukan untuk menghubungkan Thailand, Singapore, dan Malaysia. Selain itu, Thailand juga melakukan pengajuan pendanaan untuk

pengerjaan Proyek Koridor Ekonomi Timur melalui pembangunan industri manufaktur sebesar US\$ 44 miliar. (AIIB, 2019) Myanmar juga melakukan permintaan pendanaan terhadap beberapa proyek pembangunan infrastruktur yang mencakup pelabuhan di Rakhine State dan pembangunan kawasan ekonomi di Kyaukphyu dengan total investasi sebesar US\$ 10 miliar. (AIIB, 2019) Beberapa negara lain di Asia Tenggara juga menerima pendanaan dengan jumlah besar, seperti Malaysia dengan dana investasi mencapai lebih dari US\$ 30 miliar, Kamboja dengan pinjaman hingga US\$ 3 miliar, dan Vietnam sebesar US\$ 1,6 miliar.

Perluasan pengaruh Tiongkok melalui *Belt and Road Initiative* (BRI) tidak hanya mengancam kepentingan strategis Amerika Serikat sebagai pesaing utama Tiongkok tetapi juga India sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar ke lima di dunia dan salah satu negara besar di Asia. (Chaudhuri, 2017) Upaya penting yang dilakukan India melalui kebijakan luar negerinya untuk membendung dan menandingi Tiongkok di Asia adalah perubahan kebijakan dari *Look East* menjadi *Act East* melalui peningkatan kontribusi kerjasama dan kemitraan strategis.

Look East merupakan kebijakan luar negeri India dalam menyikapi serta memandang dinamika serta peta politik di wilayah Timur Asia yang didalamnya juga mengikutsertakan Tiongkok sebagai aktor yang dianggap dapat mengganggu kepentingan India disana. Kebijakan ini dirumuskan oleh P. V. Narasimha Rao, Perdana Menteri India, untuk mulai membangun hubungan baik melalui peningkatan sinergitas dan konsolidasi pasca Perang Dingin dengan negara-negara di wilayah Timur Asia, salah satunya Asia Tenggara yang dianggap memiliki

prospek dan nilai strategis yang menguntungkan bagi India. Oleh karena itu, sangat penting bagi India untuk mendapatkan kepercayaan dari negara-negara yang tergabung dalam regional ASEAN (Shahin, 2003).

Selain itu, dengan adanya *Look East*, India memiliki instrumen kebijakan luar negeri untuk menghadapi masuknya pengaruh Tiongkok ke Asia Tenggara. Namun, setelah lebih dari dua dekade, India merubah kebijakan *Look East* menjadi *Act East* oleh Narendra Modi ,Perdana Menteri India, pada 2014 di ASEAN-India Summit. Perubahan ini dianggap sebagai peningkatan hubungan dan kerja sama antara India dengan negara-negara di Asia Tenggara dalam menjawab tantangan yang lebih luas dan komprehensif. (Rajendram, 2014)

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang memuat bahasan serupa. Jurnal dari Muhammad Fathullah, Hubungan Internasional Universitas Airlangga dengan judul: Dari *Look East* ke *Act East*: Arti Penting Perubahan Kebijakan Luar Negeri India terhadap Negara-Negara di Asia Tenggara. Tulisan ini menjelaskan mengenai serangkaian alasan dan faktor yang mendasari India dalam merubah kebijakan luar negerinya, khususnya terhadap negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang sebelumnya menerapkan kebijakan *Look East* kemudian berubah menjadi kebijakan *Act East*. Hal tersebut tentunya tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dan pertumbuhan. Kemudian, skripsi dari Arifah Raihana RA, Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul : Pengaruh Kerjasama Pertahanan India-Vietnam dalam Menghadapi Tiongkok di Sengketa Laut China Selatan. Secara keseluruhan tulisan ini menjelaskan mengenai latarbelakang, tujuan dan orientasi dari terbentuknya

kerjasama pertahanan yang dilakukan oleh India dan Vietnam khususnya dalam membendung kekuatan serta pengaruh Tiongkok di LCS.

Lalu ada jurnal dari Nurul Adi Prasetyo Hubungan Internasional Universitas Jember (UNEJ) dengan judul : Kerjasama India-Vietnam dalam Eksplorasi Minyak sebagai Resistensi atas klaim China di Laut China Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan cara yang efektif bagi India untuk melawan Tiongkok di kawasan Laut Cina Selatan. Berdasarkan penelitian sebelumnya, menurut saya topik ini menarik untuk diangkat karena tulisan mengenai keterlibatan India dalam dinamika di kawasan Asia Tenggara merupakan topik dengan penelitian yang masih minim jika dibandingkan dengan Amerika Serikat sebagai pesaing utama Tiongkok. Selain itu, topik ini juga lebih spesifik membahas mengenai hubungan kerjasama dan kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama pembangunan yang berkelanjutan antara India dengan Vietnam. Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan supaya dapat memetakan seberapa jauh strategi dan implementasi kebijakan luar negeri India di kawasan Asia Tenggara dalam memperluas serta menanamkan pengaruhnya melalui kebijakan *Act East*, terutama dalam mengimbangi kebangkitan Tiongkok. Meningkatnya keterlibatan India dalam pembangunan di negara-negara Asia Tenggara selama satu dekade terakhir merupakan bagian integral dari visi India tentang arsitektur keamanan yang terbuka, inklusif, berbasis pada keteraturan, dan tentunya ramah terhadap kepentingan luar negeri India.

1.2 Rumusan Masalah

Susunan latar belakang penelitian yang sudah penulis susun kemudian menghasilkan rumusan masalah yang akan diteliti lebih lanjut, adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kerjasama bilateral antara India-Vietnam Menghadapi Dominasi Tiongkok di Asia Tenggara ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini ditujukan untuk mengetahui gambaran umum mengenai kebijakan luar negeri India dan Tiongkok dalam menyikapi prospek Asia Tenggara sebagai kawasan yang dapat memberikan keuntungan bagi kepentingan negara mereka.

2. Tujuan Khusus

Penelitian ini diharapkan mampu membantu penstudi ilmu Hubungan Internasional dalam menyusun dan mengembangkan penelitiannya khususnya yang berkaitan dengan keterlibatan India dalam dinamika geopolitik dan geoekonomi di Asia Tenggara sebagai upaya untuk mengimbangi pengaruh Tiongkok.

1.4 Manfaat Penelitian

Untuk selanjutnya, penelitian yang penulis susun diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis yang penulis harapkan bisa didapatkan dari penelitian ini adalah mampu memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran terhadap penelitian yang sudah ada sebelumnya serta dapat menjadi referensi bagi karya ilmiah lain khususnya bagi studi bidang keilmuan Hubungan Internasional.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang penulis harapkan bisa didapatkan dari penelitian ini adalah mampu membantu para akademisi khususnya dari ilmu Hubungan Internasional yang memiliki fokus bahasan serupa dalam menyusun serta mengembangkan penelitiannya. Bagi kalangan umum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna untuk membantu masyarakat dalam memahami dinamika politik internasional dikawasan Asia Tenggara serta persaingan antara India dan Tiongkok dalam mendapatkan pengaruh dikawasan itu.

1.5 Kerangka Pemikiran

TEORI LIBERALISME

Supaya rumusan masalah yang diajukan dapat dijawab maka dibutuhkan kerangka teori sebagai alat analisis yang akan membantu penulis dalam menjelaskan setiap data dan fenomena yang ada dalam penelitian sehingga penulis memiliki kerangka pemikiran yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada penelitian ini penulis menggunakan Teori Liberalisme.

Teori Liberalisme dalam hubungan internasional berakar pada pemikiran filsuf pencerahan seperti John Locke dan Immanuel Kant. Paradigma ini menekankan bahwa negara-negara dapat mengejar kepentingan bersama melalui

kerjasama dan institusi internasional, serta bahwa perdagangan dan interdependensi ekonomi dapat menciptakan insentif untuk perdamaian. Salah satu konsep kunci dalam teori Liberalisme adalah gagasan tentang perdamaian demokratik, yang menyatakan bahwa negara-negara demokratis cenderung tidak berperang satu sama lain. Menurut Bruce Russett, “Demokrasi mendorong norma-norma penyelesaian konflik secara damai di dalam negeri yang kemudian tercermin dalam perilaku internasional negara tersebut” (Russett, 1993). Dalam konteks ini, kerjasama India-Vietnam dapat dilihat sebagai upaya untuk mempromosikan norma-norma penyelesaian konflik secara damai di kawasan Asia Tenggara.

Aspek penting lainnya dari teori Liberalisme adalah penekanan pada peran institusi internasional dalam memfasilitasi kerjasama antar negara. Robert Keohane, dalam karyanya “After Hegemony” (1984), berpendapat bahwa institusi internasional dapat membantu negara-negara mengatasi dilema tindakan kolektif dan memungkinkan kerjasama bahkan dalam sistem internasional yang anarki.

Teori Liberalisme juga menekankan pentingnya interdependensi ekonomi dalam menciptakan hubungan internasional yang lebih stabil. Menurut Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye dalam karya mereka “*Power and Interdependence*” (1977), interdependensi kompleks antara negara-negara dapat mengurangi kemungkinan konflik dengan meningkatkan biaya konfrontasi dan meningkatkan insentif untuk kerjasama. Dalam konteks kerjasama India-Vietnam, fokus pada pembangunan berkelanjutan mencerminkan upaya untuk membangun hubungan ekonomi yang saling menguntungkan dan tahan lama. Ini sejalan dengan argumen

liberal bahwa peningkatan perdagangan dan investasi antar negara dapat menciptakan kepentingan bersama yang mendorong stabilitas dan kerjasama.

Teori Liberalisme juga menekankan peran ide dan nilai-nilai dalam membentuk perilaku negara. Alexander Wendt, dalam artikelnya "*Anarchy is What States Make of It*" (1992), berpendapat bahwa struktur internasional tidak hanya ditentukan oleh distribusi kekuatan material, tetapi juga oleh ide-ide dan praktik-praktik sosial. Seperti yang dikemukakan oleh Andrew Moravcsik dalam "*Taking Preferences Seriously: A Liberal Theory of International Politics*" (1997), teori liberal mengakui bahwa negara-negara memiliki preferensi yang berbeda dan bahwa konflik dapat muncul ketika preferensi ini bertentangan.

Robert Keohane, dalam karyanya "After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy" (1984), mengembangkan teori neoliberal institusionalisme, yang merupakan bagian dari tradisi liberal dalam hubungan internasional. Berikut adalah beberapa indikator utama dari teori ini yang relevan dengan analisis kerjasama bilateral:

1. Interdependensi Kompleks
2. Institusi Internasional
3. Kepentingan Bersama
4. Informasi dan Transparansi
5. Interaksi Berkelanjutan
6. Pembelajaran dan Adaptasi

1.6 Argumen Penelitian

Sebagai salah satu negara terbesar di dunia dan Asia, India memandang perluasan pengaruh Tiongkok melalui *Belt and Road Initiative* (BRI) tidak hanya mengancam kepentingan strategis Amerika Serikat sebagai pesaing utama Tiongkok tetapi juga India sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar ke lima di dunia dan salah satu dari tiga negara besar di Asia. Upaya penting yang dilakukan India melalui kebijakan luar negerinya untuk membendung dan menandingi Tiongkok di Asia adalah perubahan kebijakan dari *Look East* menjadi *Act East* melalui peningkatan kontribusi kerjasama dan kemitraan strategis untuk menebarkan pengaruhnya, salah satunya terhadap negara-negara di Asia Tenggara seperti Vietnam. Vietnam menjadi salah satu fokus utama India di Asia Tenggara karena memiliki keterikatan hubungan positif sejak lama. Selain itu, India melihat

Vietnam sebagai negara yang memiliki konvergensi kepentingan strategis dan ekonomi. Mulai dari konflik maritim di Laut Cina Selatan hingga ketergantungan ekonomi dengan Tiongkok. Berdasarkan hal tersebut, India ingin memaksimalkan potensi serta kesempatan yang ada untuk menjadi aktor penting di Asia Tenggara, dengan menjadi aktor yang signifikan bagi Vietnam.

1.7 Operasional Konsep

Operasionalisasi konsep digunakan untuk menjelaskan keterkaitan dan hubungan dari konsep-konsep yang ada pada penelitian supaya mudah untuk dipahami. Pada penelitian ini, India memandang manuver Tiongkok di Asia Tenggara sebagai ancaman terhadap kepentingan nasionalnya sehingga India harus mulai bertindak melalui kebijakan luar negerinya yang bertujuan untuk menandingi

pengaruh Tiongkok dikawasan itu. Salah satu cara yang digunakan adalah membuka kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara.

1.7.1 Defirnisi Konseptual

1.7.1..1 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional merupakan salah satu komponen penting dalam yang membentuk hubungan internasional. Kebijakan luar negeri setiap negara dirumuskan atas dasar kepentingan nasionalnya dan selalu bekerja untuk mengamankan tujuannya. Ini adalah hak yang diterima secara universal dari setiap negara untuk mengamankan kepentingan nasionalnya. Suatu negara selalu berusaha untuk membenarkan tindakannya atas dasar kepentingan nasionalnya. Perilaku suatu negara selalu dikondisikan dan diatur oleh kepentingan nasionalnya. Dalam menjalankan kepentingan nasionalnya, suatu negara dapat menerapkan berbagai macam pilihan instrumen baik melalui *hardpower* maupun *soft power* dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup negaranya. Kepentingan Nasional dapat diartikan sebagai tuntutan, tujuan, sasaran, tuntutan, dan kepentingan yang selalu diupayakan oleh suatu bangsa untuk dipelihara, dilindungi, dipertahankan, dan diamankan dalam hubungannya dengan bangsa lain. (Dinesh, 2017)

1.7.1.2 Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri merupakan salah satu bagian dari pemenuhan serangkaian tujuan nasional suatu negara melalui tindakan, langkah, dan peran yang akan menggambarkan sikap atau perilaku suatu negara dalam konteks eksternal. Para ahli telah menggambarkan kebijakan luar negeri sebagai pola perilaku yang diadopsi oleh satu negara dalam hubungannya dengan negara lain atau sebagai

strategi dan taktik yang digunakan oleh negara dalam hubungannya dengan negara lain dalam sistem internasional. Secara sederhana, politik luar negeri bisa berarti sikap eksternal suatu negara. Tujuan utamanya adalah untuk memaksimalkan keuntungan yang lebih besar bagi negara. Untuk tujuan ini, kebijakan luar negeri suatu negara akan terus mengalami perkembangan secara berkelanjutan sebagai suatu bentuk adaptasi terhadap berbagai macam permasalahan, hambatan, dan tantangan pada dunia internasional. Kebijakan luar negeri juga merupakan perpanjangan dari kebijakan domestik suatu negara sehingga dapat menggambarkan kondisi dan kebutuhan suatu negara. Dalam membuat kebijakan luar negeri terdapat beberapa proses yang harus dilakukan, yaitu niasiasi, perumusan, dan implementasi kebijakan. (Folarin, 2017)

1.7.1.3 Kerjasama Bilateral

Kerjasama bilateral melibatkan partisipasi dua negara yang berbeda, atau lembaga dari dua negara tersebut. Sumber kerjasama bilateral adalah pemerintah negara-negara yang memelihara hubungan berdasarkan Kerjasama Internasional. Hubungan tersebut bersifat government-to-government, melalui kedutaan atau instansi yang menjadi instansi kerjasama, serta badan koordinasi teknis. (Minenergia, 2011) Dalam kerja sama bilateral, kerja sama terjadi pada isu-isu yang menjadi kepentingan kedua negara yang bersangkutan.

Kerja sama bilateral terkait dengan politik luar negeri suatu negara yang menggunakan kerja sama untuk mempertahankan pengaruh luarnya di negara penerima. Dalam kerjasama bilateral, dua negara dapat memutuskan dan menyepakati margin keuntungan, keuntungan dan kerugian mereka. Terkadang,

satu negara dapat mengambil keuntungan lebih baik dari perjanjian atau kesepakatan dibandingkan dengan negara lain. Terdapat beberapa jenis dari kerjasama yang dilakukan oleh dua negara, yaitu keuangan atau perekonomian, rekanaan, teknis, bantuan makanan, bantuan kemanusiaan, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, sumbangan hingga subsidi.

1.7.1.4 *Soft Power*

Konsep mengenai kekuatan lunak atau *soft power* pertama kali dicetuskan oleh Joseph S. Nye pada akhir 1980-an dimana Nye mendefinisikan konsep itu sebagai suatu kemampuan yang dimiliki oleh negara dalam mempengaruhi pihak lain untuk melakukan apa yang diinginkannya baik melalui paksaan maupun tidak. (Nye, 2004) Suatu negara tidak hanya membutuhkan kekuatan keras dari militer untuk dapat mendominasi negara-negara lainnya tetapi juga harus memiliki kekuatan lunak melalui berbagai macam aspek dan komponen non-militer seperti perekonomian, perdagangan, budaya, teknologi, ilmu pengetahuan, kerjasama hingga bantuan kemanusiaan yang membuat negara lain menganggap bahwa negara kita adalah entitas yang penting bagi kepentingan nasional mereka.

1.7.2 Definisi Operasional

1.7.2.1 Kepentingan Nasional

Konsep kepentingan nasional dalam penelitian ini digunakan untuk memahami perilaku dan respon dari negara-negara yang bersangkutan, terutama India dalam melihat kepentingan nasional Tiongkok di Asia Tenggara yang berdampak pada kepentingan nasional India di wilayah itu. Selain itu, konsep ini

juga dapat digunakan untuk memproyeksikan orientasi kebijakan yang akan diterapkan oleh suatu negara berdasarkan kepentingan nasionalnya.

1.7.2.2 Kebijakan Luar Negeri

Konsep kebijakan luar negeri pada penelitian ini digunakan untuk memahami perpindahan kebijakan luar negeri India dari *Look East* menjadi *Act East* terhadap “timur” negaranya, salah satunya Asia Tenggara sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis dan potensial yang besar di awal abad ke-21. Kemudian, konsep ini juga digunakan untuk memahami kebijakan luar negeri Tiongkok melalui *Belt and Road Initiative* dalam memproyeksikan kepentingan nasionalnya di negara lain melalui sabuk darat dan lautnya yang tentunya memancing respon dari negara kompetitor disekitarnya, seperti India.

1.7.2.3 Kerjasama Bilateral

Konsep kerjasama bilateral dalam penerapannya dapat digunakan untuk memahami bentuk dan arah kerjasama yang dilakukan oleh India dan Vietnam.

1.7.2.4 Soft Power

Konsep *soft power* digunakan untuk memahami tujuan dan orientasi dari kebijakan luar negeri India dan Tiongkok yang sama-sama ingin merebutkan pengaruh terhadap kawasan disekelilingnya, dalam hal ini Asia Tenggara salah satunya melalui kerjasama.

1.8 Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah metode kualitatif dimana bentuk penulisan akan bersifat deskriptif dan analitis serta menggunakan penalaran induktif guna menjawab rumusan pertanyaan riset. Pada

metode penelitian ini penulis akan menggunakan kerangka teori untuk menganalisis data dan fenomena yang ada melalui generalisasi secara empiris untuk menghasilkan kesimpulan penelitian.

1.9 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih tipe penelitian deskriptif analitis dimana dalam penulis akan menjelaskan setiap fenomena serta data yang disuguhkan dan kemudian dianalisis menggunakan kerangka teori dan konsep yang ada untuk menjawab pertanyaan penelitian dan membuat kesimpulan.

1.10 Jenis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan data kualitatif. Data kualitatif bersifat deskriptif dan analitis. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari jurnal, buku, website, hingga karya ilmiah yang memiliki relevansi dan mendukung penelitian.

1.11 Sumber Data

Data-data yang disuguhkan penulis dalam penelitian ini diambil dari sumber data sekunder. Sumber data sekunder mengacu pada dokumen-dokumen yang didapatkan melalui narasi maupun tulisan-tulisan baik secara luring maupun daring dari berbagai sumber yang berkaitan dengan aktor dan objek yang ada didalam penelitian. Sebagai contoh, jurnal ilmiah dari instansi pemerintahan dari aktor yang dianalisis hingga karya ilmiah dari para ahli yang memiliki fokus penelitian di topik atau bidang yang sama.

1.12 Teknik Pengumpulan Data

Dalam menghimpun data-data penelitian penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dimana materi yang dijadikan sumber penulisan didapat dari berbagai dokumen hingga laporan yang tersedia di website, e-book, hingga perpustakaan.

1.13 Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Dalam teknik ini, pertama-tama penulis harus mampu memilah dan menyeleksi data yang benar-benar digunakan sesuai kebutuhan penelitian atau reduksi data. Kemudian, data-data tersebut disusun dan disajikan baik secara naratif hingga bagan. Tahap akhir penulis akan melakukan penarikan kesimpulan serta memverifikasi data-data yang ada.

1.14 Kualitas Data

Dalam menyusun penelitian ini penulis berusaha untuk mengambil data dari sumber yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan serta guna menghindari data yang bias dan ambigu, penulis terlebih dahulu membandingkan satu data dengan data-data yang lainnya.

1.15 Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan. Pada bab ini penulis akan menjelaskan pendahuluan dari penelitian yang dimuat pada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, kerangka teori, argumen penelitian, metode penelitian, definisi konsep, definisi operasional, operasionalisasi konsep, tipe penelitian, jenis data, sumber data, teknik analisis data hingga kualitas data.

Bab II : Dinamika Kebijakan Luar Negeri India, Vietnam, Dan Tiongkok.

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai gambaran dan orientasi kebijakan luar negeri India dan Tiongkok di Asia Tenggara termasuk bagaimana kedua negara tersebut mempersepsikan kawasan itu. Bab ini juga menjelaskan mengenai hubungan yang terjalin antara aktor-aktor yang terlibat.

Bab III : Kerjasama bilateral antara India-Vietnam Menghadapi Dominasi Tiongkok di Asia Tenggara. Bab ini merupakan inti pembahasan dari rumusan masalah yang diajukan dimana penulis akan menjelaskan Interdependensi Kompleks dalam Hubungan India-Vietnam, Institusi dan Mekanisme Kerjasama India-Vietnam, Identifikasi Kepentingan Bersama India-Vietnam, Peningkatan Informasi dan Transparansi, Interaksi Berkelanjutan dan Prospek Masa Depan dan Pembelajaran dan Adaptasi Strategis.

Bab IV : Kesimpulan. Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari penelitian yang sudah disusun.

